

## Departemen Tenaga Kerja A.S.

### Temuan 2022 mengenai Bentuk Kerja Anak Terburuk

#### Indonesia

Pada 2022, Indonesia membuat kemajuan yang moderat dalam upaya menghilangkan bentuk terburuk kerja anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersama dengan Children's Fund Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan program Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak, sebuah kemitraan 3 tahun sebagai tanggapan terhadap laporan bahwa anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual secara daring. Kementerian Ketenagakerjaan juga meningkatkan dana untuk inspektorat tenaga kerja dari \$12,2 juta pada tahun 2021 ke \$15,1 juta di tahun 2022, dan meningkatkan jumlah inspektur tenaga kerja sebanyak 267 orang, sehingga total mencapai 1.570. Namun, anak-anak di Indonesia dihadapkan pada bentuk terburuk dari kerja anak, termasuk eksploitasi seksual komersial, kadang-kadang sebagai akibat perdagangan manusia. Anak-anak juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya di pertanian perkebunan, termasuk produksi minyak kelapa sawit dan tembakau. Sekali pun ada peningkatan pendanaan dan inspektur di tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan masih kekurangan sumber daya finansial dan personil yang perlu untuk sepenuhnya menegakkan hukum tenaga kerja anak di seluruh negara. Selain itu, larangan perdagangan anak di Indonesia juga tidak sejalan dengan hukum internasional karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia mewajibkan diperlihatkannya bukti ancaman, penggunaan kekerasan atau pemaksaan untuk menetapkan bahwa tindak pidana perdagangan anak terjadi.

#### Tindakan Pemerintah yang Disarankan untuk Menghilangkan Kerja Anak

Bidang	Tindakan yang Disarankan	Tahun-Tahun yang Disarankan
Kerangka Kerja Hukum	Memastikan ancaman, penggunaan kekuatan, atau pemaksaan tidak harus dibuktikan untuk kejahatan perdagangan anak.	2018 – 2022
	Memastikan pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan berbahaya yang dilarang untuk anak-anak termasuk sektor-sektor di mana kerja anak diketahui berlangsung, termasuk joki untuk balapan kuda.	2019 – 2022
	Memastikan hukum tenaga kerja yang mengatur kerja ringan memerinci kegiatan di mana pekerjaan ringan diizinkan untuk anak-anak.	2020 – 2022
	Menetapkan berdasarkan hukum, pendidikan publik dasar bebas pungutan dengan mencabut peraturan yang mengizinkan sekolah memungut biaya.	2020 – 2022
Penegakan	Memastikan pendanaan inspektorat tenaga kerja adalah cukup untuk mencakup infrastruktur kantor, transportasi, dan kebutuhan	2018 – 2022

## Tindakan Pemerintah yang Disarankan untuk Menghilangkan Kerja Anak

Bidang	Tindakan yang Disarankan	Tahun-Tahun yang Disarankan
	bahan bakar sehingga memberdayakan para inspektur tenaga kerja melaksanakan inspeksi.	
	Meningkatkan jumlah inspektur tenaga kerja dari 1.570 ke 9.047 untuk menyediakan lingkup yang memadai untuk sekitar 135,7 juta orang.	2010 – 2022
	Memastikan bahwa para inspektur tenaga kerja mempunyai otoritas hukum untuk melakukan inspeksi di sektor informal, termasuk di pertanian dan rumah swasta, di mana tenaga kerja anak sering terjadi.	2018 – 2022
	Memastikan semua personil penegak hukum pidana menerima pelatihan yang memadai dalam aturan-aturan tenaga kerja anak dan undang-undang terkait.	2017 – 2022
	Memperkuat sistem inspeksi dengan melakukan inspeksi mendadak.	2022
	Menerbitkan informasi penegakan hukum, termasuk jumlah penyidikan yang dilakukan, penuntutan yang dimulai, vonis bersalah yang dicapai, dan hukuman yang dikenakan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kerja anak, termasuk bentuk yang terburuk.	2009 – 2022
	Menyediakan sumber-sumber daya untuk mengumpulkan dan melakukan sentralisasi data nasional mengenai kerja anak, mewajibkan pelaporan berdasarkan daerah, dan memberikan spesifikasi mengenai tindak pidana kerja anak yang dirujuk oleh data terkumpul itu.	2022
	Mendanai secara cukup gugus tugas anti-perdagangan manusia pada tingkat nasional, provinsi dan setempat untuk melakukan penyidikan-penyidikan dan menjalankan mandat yang dimaksudkan.	2016 – 2022
Program Sosial	Melakukan penelitian untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan kerja yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk sektor pekerjaan konstruksi dan jalan, guna memberi masukan untuk kebijakan dan program sosial.	2014 – 2022
	Mengumpulkan dan menerbitkan data prevalensi tentang tenaga kerja anak usia 5 sampai 10 tahun.	2019 – 2022
	Meningkatkan usaha untuk menghilangkan perintang ke pendidikan, termasuk memastikan agar semua anak bisa	2016 – 2022

---

**Tindakan Pemerintah yang Disarankan untuk Menghilangkan Kerja Anak**

---

<b>Bidang</b>	<b>Tindakan yang Disarankan</b>	<b>Tahun-Tahun yang Disarankan</b>
	memperoleh kartu pengenal yang diterbitkan pemerintah sehingga mereka bisa bersekolah.	
	Memastikan bahwa sumber data terbaru dari pemerintah mengenai tenaga kerja anak digunakan secara konsisten di semua kementerian sebagai landasan program.	2022
	Memastikan bahwa adanya kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal untuk Program Pendidikan Dasar dan memungkinkan akses publik untuk informasi mengenai pelaksanaannya.	2022
	Memastikan bahwa adanya kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk melaksanakan Pusat Pembelajaran Komunitas dan memungkinkan akses publik untuk informasi mengenai pelaksanaannya.	2022

---